

CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2024

IKU KABUPATEN								IKU ESELON II				IKU ESELON III		IKU ESELON IV	
	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	TARGET INDIKATOR TUJUAN RPJMD 2022	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD	TARGET INDIKATOR SASARAN	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS BIDANG	SASARAN STRATEGIS SEKSI	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS SEKSI
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	16	17
1	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Menciptakan Suasana Kondusif yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Ketahanan Nasional (poin)	2.78	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (poin)	84.36	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Peningkatan Usaha Mandiri	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Peningkatan Usaha Mandiri	1. Meningkatkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Gender	1 Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka
								Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang	Meningkatnya Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Sosial Keluarga	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah Pelatihan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
											Rasio KDRT	Meningkatnya Layanan Perlindungan Perempuan	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan	1 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
														2 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan
														3 Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana PrasaranaLayanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Lembaga Layanan Tingkat Kabupaten /Kota Terbentuk
														4 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Kekerasan	Jumlah SDM Unit Layanan yang sudah mendapat sertifikasi layanan bagi perempuan Korban KDRT
											Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Meningkatnya Layanan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Layanan Terhadap Perempuan dan Anak	Terlaksananya Penyedia Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten yang Tersedia
										Meningkatnya Layanan Pemenuhan Hak Layak Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Kabupaten Layak Anak yang Terlaksana

															2	Terselenggaranya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				
															Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak	Persentase Layanan Perlindungan Khusus Anak	1	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	1	Jumlah Pertemuan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
																		2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	2	Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
																		3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan
																		4	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	4	Jumlah Terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa
																		5	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	5	Jumlah Peserta Pertemuaneningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
																		6	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

								Meningkatkan Layanan yang Berkualitas oleh Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional	Persentase Layanan Terpadu Penaggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Sosial Keluarga	Persentase Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Keluarga	1	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah Puskesmas yang terlaksana
												Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat		Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang Terbentuk
												Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan KAT	Jumlah Pendampingan Pemberdayaan KAT
										Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Bimbingan yang di berikan kepada PMKS
											Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	2	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Bimbingan yang di berikan kepada PMKS
								Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Validasi dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin	Jumlah Validasi dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial yang Tersedia
								Meningkatnya Penanganan Bencana			Meningkatnya Penanganan Bencana	Meningkatnya Jumlah Kampung Siaga Bencana	Persentase Penanganan Bencana		Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

PEMERINTAH KABUPATEN MANAU

DINAS PEMBANGUNAN PERUMPAHAN, PENGELOMPOKAN ANAK DAN SOSIAL

Manau, 03 Februari 2024

Kepala Dinas DPPPAS

Lawing Liban, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19690514 199803 1 011